PENGARUH PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN DAERAH, AKSESIBILITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH DAN PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAANKEUANGAN DAERAH KOTA DUMAI

Oleh:
Mirza Masyhur
Pembimbing : Hardi dan Alfiati Silfi

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia
Email : masyhurmirza@gmail.com

The Effect of Regional Financial Statement Presentation, Accessibility of Financial Statements and Internal Control Areas to Transparency and Accountability in The Management of Local Financial Statements in Dumai City.

ABSTRACT

This study aimed to determine the effect of regional financial statement presentation, accessibility of financial statements and internal control areas to transparency and accountability in the management of local financial statements in Dumai city. The population in this research is all working unit of regional government (SKPD) in Dumai city which totally 34 SKPD. Samples in this study obtained by using purposive sampling method. This study uses multiple regression analysis linear with SPSS version 20.0. This study uses the classical assumption of the normality test, heterokedasity test, auto test correlation, multicollinearity test, as well as for hypothesis testing using t. This study proves that all the independent variables affect the dependent variable with a significant level (α) <0.05 and a coefficient of determination of 83.4%. Indicated that the financial statement presentation area, accessibility of financial statements and internal control areas affect transparency and accountability in the management of local financial statements amounted to 83.4% Dumai city. and 16.6% are other variables that may affect the transparency and accountability in the management of financial statements in Dumai city areas that are not included in this study.

Keywords: Financial Statement, Accessibility, Internal Control, Transparency, Accountability.

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan daerah di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 dan Peraturan Mentri dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 yang di perbaharui menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan ini khusus mengatur mengenai pedoman pengelolaan keuangan daerah yang baru sesuai arah reformasi tata kelola keuangan negara atau daerah. Perubahan yang sangat mendasar dalam peraturan ini adalah bergesernya fungsi

ordonancing dari Badan atau Bagian Keuangan ke setiap SKPD dan SKPD sebagai *accounting entity* berkewajiban untuk membuat laporan keuangan SKPD serta penegasan bahwa Bendahara Pengeluaran sebagai Pejabat Fungsional Dalam era Otonomi Daerah seperti sekarang ini, *good governance* menjadi suatu hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi keberadaannya dan mutlak harus terpenuhi.

Dua variabel terpenting dari *good governance* adalah transparansi dan akuntabilitas dalam tingkat kebijakan dan administratif anggaran. Semangat desentralisasi, demokratisasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses penyelenggaraan pemerintah pada umumnya dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya (Sumarsono,2009). Perhatian terhadap isu transparansi dan akuntabilitas keuangan publik di Indonesia semakin meningkat dalam dekade terakhir ini.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, BPK Perwakilan Provinsi Riau melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) pada Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2014 pada semester I tahun 2015. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Riau, Drs. Widiyatmantoro kepada Ketua DRPD Kota Dumai, Gusri Effendy dan Sekretaris Daerah Kota Dumai (mewakili Walikota Dumai) Drs. H. Said Mustafa, M.Si. di Auditorium Kantor Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Riau, Rabu, 3 Juni 2015 pukul 09.00 WIB. LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014 dikemas dalam tiga buku. Buku I adalah LHP yang memuat Laporan Keuangan Pemerintah dan opini atas Laporan Keuangan tersebut. Buku II memuat atas Sistem Pengendalian Intern dan Buku III adalah LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia memberikan opini **Wajar Dengan Pengecualian** atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Dumai Tahun Anggaran 2014. BPK menemukan adanya **kelemahan sistem pengendalian intern** dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu: (1) Penatausahaan kas Pemerintah Kota Dumai kurang memadai; (2) Aset Lainnya – Aset Lain-lain tidak diyakini kewajarannya; (3) Kesalahan penganggaran pada empat SKPD; (4) Penatausahaan dan pengelolaan aset tetap pada Pemeritah Kota Dumai belum memadai; dan (5) Penyertaan modal Pemerintah Kota Dumai pada PDAM Tirta Dumai Bersemai dan PT Pembangunan Dumai tidak sesuai ketentuan. BPK juga menemukan adanya **ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan** dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu: (1) Pelaksanaan paket pekerjaan revitalisasi ruang kelas SDN Wilayah Labour Housing 10 kelas bertingkat tidak sesuai kontrak dan terdapat kelebihan pembayaran

atas kekurangan volume pekerjaan; (2) Terdapat penggunaan atas penerimaan retribusi Terminal Barang; dan (3) Jaminan Pelaksanaan tidak melindungi periode Perjanjian Kerjasama dan dicairkan oleh Penyedia Barang/Jasa.

Transparansi merupakan kebebasan untuk mengakses aktifitas politik dan ekonomi pemerintah dalam pengambilan keputusan keputusannya, dan akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas keuangan ,pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundang – undangan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang pengelolaan keuangan daerah dan perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Dari hasil audit yang dilakukan oleh BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Kota Dumai, laporan keuangan tersebut mendapatkan hasil Wajar Dengan Pengecualian. Pengecualian yang diberikan oleh BPK meliputi : Penatausahaan kas Pemerintah Kota Dumai kurang memadai, Aset Lainnya – Aset Lain-lain tidak diyakini kewajarannya, Kesalahan penganggaran pada empat SKPD, Penatausahaan dan pengelolaan aset tetap pada Pemeritah Kota Dumai belum memadai dan Penyertaan modal Pemerintah Kota Dumai pada PDAM Tirta Dumai Bersemai dan PT Pembangunan Dumai tidak sesuai ketentuan. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti bagaimana transparansi dan akuntabilitas yang ada pada SKPD di Kota Dumai.

Laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi keuangan sehingga dapat memenuhi tujuannya. Menurut PP No. 24 Tahun 2005 Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Penyajian laporan keuangan yang baik akan memberikan suatu kejelasan dalam pengelolaan keuangan suatu entitas yang di berikan wewenang untuk mengelola anggaran yang diberikan. Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan menciptakan akuntabilitas.

Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan (Mulyana, 2006). Laporan keuangan harus dapat dimengerti dan tersedia bagi mereka yang tertarik dan mau berusaha untuk memahaminya (Rohman, 2009). Aksesibilitas laporan keuangan daerah diukur berdasarkan presepsi dari responden mengenai akses publik terhadap laporan keuangan daerah.

Sistem Pengendalian Intern merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai

atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, peneliti mengidentifikasikan masalah sebagai berikut : 1). Apakah Penyajian Laporan Keuangan berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Dumai? 2). Apakah Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Dumai? 3). Apakah Pengendalian Internal berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Dumai?

Sedangkan tujuan penelitian ini adalah : 1). Menguji pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah Kota Dumai. 2). Menguji aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Dumai. 3). Menguji Pengendalian Internal terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kota Dumai.

TELAAH PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Penyajian laporan keuangan

Penyajian Laporan keuangan pemerintah merupakan hak publik yang harus diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Hak publik atas informasi keuangan muncul sebagai konsekuensi konsep pertanggung-jawaban publik. Pertanggungjawaban publik mensyaratkan organisasi publik untuk memberikan laporan keuangan sebagai bukti pertanggungjawab dan pengelolaan (Mardiasmo, 2002:78). Menurut PP No. 24 Tahun 2005 menjelaskan bahwa laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.Penyajian informasi yang utuh dalam laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan nantinya akan menciptakan akuntabilitas (Nordiawan, 2010:18).

Hipotesis penelitian yang diajukan adalah:

H_1:diduga penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Aksesibilitas laporan keuangan daerah

Pentingnya penerapan akuntansi keuangan yang baik dan mudahnya masyarakat mendapatkan informasi tersebut sangat menentukan tingkat transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. ketidak mampuan laporan keuangan

dalam melaksanakan akuntabilitas, tidak disebabkan karena laporan tahunan yang tidak memuat semua informasi relevan yang dibutuhkan para pengguna, tetapi juga karena laporan tersebut tidak dapat secara langsung tersedia dan aksesibel pada para pengguna potensial. Sebagai konsekuensinya, penyajian laporan keuangan yang tidak lengkap dan tidak aksesibel dapat menurunkan kualitas dari transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

Dalam Undang-Undang nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 103, dinyatakan bahwa informasi yang dimuat dalam sistem informasi keuangan daerah merupakan data terbuka yang dapat diketahui, diakses dan diperoleh oleh masyarakat. Yang berarti pula bahwa pemerintah daerah harus membuka akses kepada pihak pengguna secara luas atas laporan keuangannya melalui internet, surat kabar atau media lain.

Hipotesis penelitian yang diajukan adalah:

H_2 : diduga aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengendalian internal

Pengendalian yang berupa pengendalian internal dan pengendalian manajemen berada di bawah kendali eksekutif (pemerintah pusat dan daerah) dan dilakukan untuk memastikan strategi dijalankan dengan baik sehingga tujuan dapat dicapai, sedangkan pemeriksaan (audit) dilakukan oleh badan yang memiliki kompetensi dan indepedensi untuk mengukur apakah kinerja eksekutif sudah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan (Mardiasmo, 2002). Menurut Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pasal 2 menyatakan bahwa untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Salah satu tujuan yang ingin dicapai dengan penerapan sistem pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai terkait keandalan penyajian laporan keuangan pemerintah. Sistem pengendalian intern tersebut harus memuat prosedur rekonsiliasi antara data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan data transaksi keuangan yang diakuntansikan oleh Bendahara Umum Negara/Daerah (PP No.8 tahun 2006).

Kewajiban tentang penyelenggaraan sistem pengendalian intern di masing-masing entitas pelaporan dan akuntansi tersebut semakin dipertegas dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2008 yang secara eksplisit mengatur apa yang dinamakan dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang secara konsep banyak mengacu kepada definisi pengendalian intern menurut *Committee of Sponsoring Organizations* (COSO).

Hipotesis penelitian yang diajukan adalah:

H_3 : diduga pengendalian internal berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Gambar 1. Model Penelitian

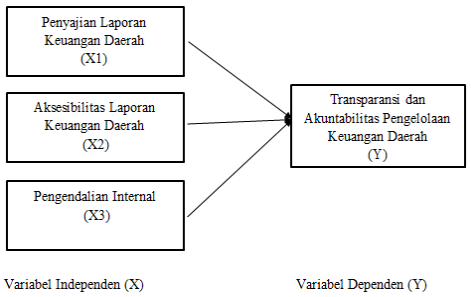

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Dumai yang berjumlah 34 SKPD.

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Dumai yang berjumlah 34 SKPD.

Sampel dalam penelitian ini adalah para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kota Dumai. Dari setiap SKPD akan diambil 2 responden yang memenuhi kriteria yang ditentukan yaitu Kepala SKPD dan Kasubag keuangan. Sehingga sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 68 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling digunakan karena informasi yang akan diambil berasal dari sumber yang sengaja dipilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan peneliti.Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Data primer yang dilakukan dalam penelitian ini berupa wawancara dan penyebaran kuesioner.

Metode pengumpulan data primer pada penelitian ini adalah dengan cara membagikan kuesioner kepada para pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi/keuangan dalam pengelolaan keuangan daerah pada SKPD Kota Dumai.

Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk menguji akurat tidaknya suatu kuesioner. Pada penelitian ini menggunakan Uji Korelasi *Bivariate Pearson*, yaitu menganalisis dengan cara mengkorelasi masing-masing skor item dengan skor total. Kriteria pengujian adalah Jika r hitung > r tabel (uji 2 sisi dengan sig. 0,005) maka instrumen atau item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan valid).

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas berguna untuk menetapkan apakah instrumen yang dalam hal ini kuesioner dapat digunakan lebih dari satu kali, paling tidak oleh responden yang sama akan menghasilkan data yang konsisten. Dengan kata lain, reliabilitas instrumen mencirikan tingkat konsistensi. Pengukuran reabilitas dapat dilakukan dengan melihat nilai *Cronbach Alpha. Cronbach Alpha* (α) suatu variabel dikatakan reliabel jika memiliki Cronbach Alpha>0,6.

Uji Normalitas

Uji Normalitas berguna untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali,2013:147). Model regresi yang baik adalah data yang terdistribusi normal atau mendekati normal. Metode yang digunakan adalah dengan *kolmogorov smirnov*. Kriteria yang digunakan dalam tes ini adalah dengan membandingkan antara tingkat signifikasi yang didapat dalam tingkat alpha yang digunakan, dimana data tersebut dikatakan berdistribusi normal bila sig>0,05.

Uji Multikolonieritas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk membuktikan atau menguji apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi antara variabel independen. Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *tolerance*<0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10 (Ghozali, 2013:106). Jika nilai *tolerance* lebih dari 10% atau VIF kurang dari 10, maka dikatakan model regresi bebas dari gejala multikolonieritas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas. Deteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED di mana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di studentized (Ghozali, 2013:139).

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode sebelumnya, jika ada berarti terdapat autokorelasi. Untuk melihat ada atau tidaknya gejala autokorelasi ini maka dapat dilakukan dengan menggunakan uji Durbin-Waston (DW test). Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai *d* (Durbin-Watson), *du* (*Upper Bound*), dan *4-du*.

Analisis Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini, alat analisis menggunakan model regresi linier berganda dengan mendapatkan persamaan regresi dalam penelitian ini adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Di mana:

Y = Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah
a = Konstanta
$b_{1,2,3,}$ = Koefisien regresi
X_1 = Penyajian laporan keuangan daerah
X_2 = Aksesibilitas laporan keuangan daerah
X_3 = Pengendalian internal

e = Error Term

Uji Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa besar kemampuan variabel-variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel independen dalam penelitian ini adalah penyajian laporan keuangan daerah(X_1), aksesibilitas laporan keuangan daerah(X_2) danpengendalian interanal (X3).Sedangkan variabel dependen adalah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan daerah(Y).

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Laporan Keuangan Daerah

Transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah berkenaan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut (Aliyah dan Aida, 2012)

Penyajian Laporan Keuangan Daerah

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan (PP No. 24 Tahun 2005)

Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah

Aksesibilitas dalam laporan keuangan adalah sebagai kemudahan seseorang untuk memperoleh informasi laporan keuangan (Mulyana, 2006:64).

Pengendalian Internal

Menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Statistik Deskriptif

Berdasarkan pengujian statistik diatas, dapat diketahui bahwavariabel statistik deskriptif masing-masing instrumen dari sebanyak 61 responden yang di teliti. Untuk instrumen variabel penyajian laporan keuangan memiliki nilai minimum sebesar 23 nilai maksimum 38 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 32.92 dengan standar deviasi sebesar

3.111. Untuk instrumen variabel aksesibilitas memiliki nilai minimum sebesar 11, nilai maksimum 15 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 13.33 dengan standar deviasi sebesar 1.121. Untuk instrumen variabel pengendalian internal memiliki nilai minimum sebesar 47, nilai maksimum 75 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 66.90 dengan standar deviasi sebesar 5.131. Untuk instrumen variabel transparansi dan akuntabilitas memiliki nilai minimum sebesar 26, nilai maksimum 35 dan nilai rata-rata (*mean*) sebesar 30.62 dengan standar deviasi sebesar 2.083.

Hasil Uji Validitas Data

Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom (df) = n – 2 dengan alpha 0,05, dalam hal ini n adalah jumlah sampel (Ghozali, 2013:53). Dalam penelitian ini df = n-2 (61-2) = 59, sehingga didapat r tabel untuk df (59) = 0,252. Dari pengujian yang dilakukan diketahui nilai r hitung seluruh item pertanyaan variabel >0,252. Artinya adalah bahwa item-item yang digunakan untuk mengukur masing-masing variabel dinyatakan valid.

Hasil Uji Realibilitas Data

Pengujian reliabilitas penelitian ini menggunakan koefisien *Cronbach Alpha*(α) dengan taksiran batasan minimal 0,6. Suatuvariabledikatakanreliablejikam emberikannilai*Cronbach Alpha*>0,6.Dari pengujian yang dilakukan bahwa koefisien reliabilitas instrumen penyajian laporan keuangan, aksesibilitas, pengendalian internal dan transparansi antara lain 0,843, 0,737, 0,787, 0,849. Dari semua nilai variabel tersebut menunjukkan bahwa koefisien*Cronbach Alpha* >0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa semua instrumen dalam penelitian ini adalah reliabel atau dapat dipercaya.

Uji Normalitas Data

Berdasarkan pengujian yang dilakukan diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,897. Jika digunakan tingkat signifikansi α= 5% atau 0,050 maka nilai signifikan lebih besar dari α (0,897> 0,050), sehingga dapat disimpulkan bahwa data model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Hasil Uji Multikolinearitas

Berdasarkan pengujian yang dilakukan diketahui nilai *variance inflation factor*(VIF) untuk seluruhvariabelbebas< 10 danbegitujugauntuknilai tolerance > 0,10. Hal inidapatdisimpulkan bahwa model regresi tersebut bebas dari multikolinearitas.

Hasil Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan pengujian yang dilakukan, gambar *Scatterplot* menunjukkan bahwa data tersebar diatas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y dan tidak membentuk suatu pola tertentu. Dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari gejala heterokedastisitas.

Hasil Uji Autokorelasi

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa nilai *d* (Durbin-Watson) sebesar 2,004 dan nilai *du* yang diperoleh dari tabel distribusi Durbin-Watson α= 5% dengan n =

banyak sampel = 61 dan k = jumlah variabel Independen = 3, maka diperoleh nilai *du* sebesar 1,6904 . Berikutnya nilai *4-du* (4 – 1,6904) sebesar 2,3096. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi karena *du*(1,6904)<*d* (2,004)<*4-du* (2,3096).

Analisis Regresi Berganda

Pengujian ini dilakukandengan menggunakan analisis regresi untuk mengetahui keberadaan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan model *multiple regression* (regresi berganda) dengan menggunakan SPSS.

Berikut disajikan tabel hasil pengolahan data SPSS secara ringkas yang menggambarkan persamaan regresinya.

Tabel 1
Hasil Uji Regresi Berganda

Model		Unstandardized coefficients		Standardized coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(constant)	1,429	4,673		4,142	,000
	Penyajian laporan keuangan	1,339	,673	,358	2,139	,000
	Aksesibilitas laporan keuangan	1,554	,562	,243	2,752	,006
	Pengendalian internal	1,347	,496	,237	2,704	,010

Sumber: *Data Olahan, 2016.*

Dari Tabel diatas maka dibuat persamaan regresi sebagai berikut :

Y= 1,429+ 1,339 X_1+1,554

X_2+1,347

X_3+e

Dari hasil regresi ditas, dapat diketahui bahwa variabel pelatihan teknis perpajakan, profesionalisme, akuntabilitas, dan perencanaan pemeriksaan pajak memiliki pengaruh terhadap kinerja pemeriksa pajak.

Uji Statistik t (Parsial)

Acuan dalam pengujian hipotesis ini adalah:
Apabila nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau *p value* <α, maka hipotesis diterima. Dan sebaliknya jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau *p value* >α, maka hipotesis ditolak.

Penyajian Laporan Keuangan Daerah Berpengaruh Terhadap TransparansiDan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Tabel 1 menunjukkan bahwa variabel penyajian laporan keuangan daerah memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu 2,139 >2,00247 dengan nilai signifikansi diperoleh adalah 0,000 < 0,05.Dapat disimpulkan bahwa semakin baik penyajian laporan keuangan daerah tentu akan semakin memperjelas pelaporan pengelolaan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada dan disajikan secara lengkap dan jujur, sehingga laporanpengelolaan keuangan daerah akan transparan dan akuntabel. Hal ini disebabkan karena didalam laporan keuangan daerah memuat informasi yang memadai untuk melihat hasil penggunaan anggaran yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengelolaan keuangan daerah.Dengan demikian hipotesis 1 diterima.

Penelitian ini konsisten dengan Arzarofatma (2015) yang mengemukakan bahwa penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah BerpengaruhTerhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Tabel 1 menunjukkan bahwa variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$yaitu2,752> 2,00247dengan nilai signifikan diperoleh sebesar 0,006< 0,05.Dapat disimpulkan bahwa dengan memberikan kemudahan akses kepada para pengguna laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan terwujudnya kepercayaan publik kepada pemerintah daerah.Hal ini didukung dengan kemampuan setiap SKPD untuk memberikan akses yang mudah dan jelas kepada setiap pengguna laporan keuangan daerah yang membutuhkan.Dengan demikian hipotesis 2 diterima.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukanSimarmata (2015) yang menyatakan bahwa aksesibilitas mempunyai pengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Pengendalian Internal Berpengaruh Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Tabel 1 menunjukkan bahwa variabel pengendalian internal memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$yaitu2,704> 2,00247dengan nilai signifikan diperoleh sebesar 0,010 < 0,05.Dapat disimpulkan bahwa denganadanya pengendalian internal yang baik akan memberikan aturan yang baik dan jelas dalam tubuh SKPD sehingga sistem yang ada didalam pengelolaan keuangan jadi lebih terstruktur dan baik. Sehingga akan menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan terwujudnya kepercayaan publik kepada pemerintah daerah.Hal ini didukung dengan kemampuan setiap pimpinan SKPD untuk memberikan pengetahuan dan sistem yang jelas serta tegas dalam pelaksanaannya. Dengan demikian hipotesis 3 diterima.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukanSari (2012). Hasil penelitiannya pengendalian internal mempengaruhi transparansi laporan keuangan, dengan arah hubungan positif. Hubungan yang terjadi merupakan hubungan yang kuat dan searah, dimana peningkatan pengendalian internal yang terjadi akan seiring dengan peningkatan transparansi laporan keuangan pemerintah Kota Cimahi.

Koefisien Determinasi (R^2)

R Square (R^2) atau kuadrat dari R menunjukkan koefisien determinasi, yang artinya persentase sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut disajikan hasil uji koefisien determinasi, yaitu :

Tabel 3
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,913[a]	,834	,819	4,03656	2,004

Sumber:*Data Olahan, 2016.*

Berdasarkan tabel diatas, diketahuinilai R square (R^2) sebesar 0,834 dan nilai*Adjusted*R^2 sebesar 0,819. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh variabel penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah dan pengendalian internal terhadap transparansi dan akuntabilitas adalah sebesar 83,4%. Sedangkan sisanya 16,6% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model regresi ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilits laporan keuangan daerah dan pengendalian internal terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangandaerah. Sampel yang digunakan adalah Kepala SKPD dan Kepala Kasubag keuangan yang berjumlah 34 SKPD di Kota Dumai. Dari evaluasi model penelitian dan pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini, menghasilkan beberapa kesimpulan antara lain :

1) Hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel penyajian laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Semakin baik penyajian laporan keuangan daerah tentu akan semakin memperbaik pelaporan keuangan pemerintah daerah karena semua transaksi dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan disajikan secara lengkap dan jujur maka laporan keuangan daerah akan transparan dan terwujudnya akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2) Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Jadi memberikan kemudahan akses kepada para pengguna laporan keuangan akan menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan terwujudnya kepercayaan publik kepada pemerintah daerah.
3) Hasil pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel pengendalian internal berpengaruh terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Jadi pengendalian internal menyatu pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai sehingga menciptakan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik dan terwujudnya kepercayaan publik kepada pemerintah daerah.

Saran

Saran-saran yang dapat diberikan oleh peneliti bagi kesempurnaan penelitian selanjutnya yaitu :

1) Untuk SKPD yang ada di Kota Dumai terutama pimpinan SKPD supaya bisa melakukan pembahasan atau sosialisasi dengan para staf bagian keuangan bahwa perlunya transparansi dan

akuntabilitas laporan keuangan SKPD supaya masyarakat bisa mengakses atau mengetahui secara rinci laporan keuangan tersebut.

2) Penelitian selanjutnya akan lebih baik lagi jika memperluas sampel penelitian, seperti tidak hanya SKPD yang terdapat di Kota Dumai, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian dengan tingkat generalisasi yang lebih tinggi.
3) Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan metode penelitian yang berbeda seperti metode wawancara langsung kepada responden untuk memperoleh data yang lebih berkualitas.
4) Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel lain seperti Standar Akuntansi Keuangan.

DAFTAR PUSTAKA

Aliyah, Siti, 2012. Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kabupaten jepara, *Jurnal Akuntansi dan Auditing.* Vol. 8. No. 2, Mei 2012.

Arzarofatma, 2015.Pengaruh penyajian laporan keuangan daerah dan aksesibilitas laporan keuangan daerah terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah kabupaten kampar. *Skripsi*. UR

BPK RI Perwakilan Provinsi Riau, 2015. LKPD KOTA DUMAI KEMBALI DAPATKAN OPINI WDP. www.bpk.com. [diakses 31 Desember 2015]

Ghozali,Imam. 2013.*AplikasiAnalisis Multivariate DenganProgram IBM SPSS20 Update PLS Regresi*.Semarang:BadanPenerbitUniversitasDiponegoro.

Kantor perpustakaan, arsip dan data elektronik kota dumai, 2015. SKPD KOTA DUMAI.www.dumaikota.go.id. [diakses 31 Desember 2015]

Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Mulyana, Budi, 2006. Pengaruh Penyajian Neraca Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan KeuanganDaerah.*Jurnal Akuntansi Pemerintah.* Vol.2 No.1, Mei 2006.

Nordiawan, Deddi, 2010. *Akuntansi Sektor Publik.* Salemba Empat, Jakarata.

Rohman, Abdul, 2009. Pengaruh Implementasi Sistem Akuntansi,Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Fungsi Pengawasan dan Kinerja Pemerintah daerah (SurveyPada Pemda di Jawa Tengah),*Jurnal Akuntansi*.

Universitas Sebelas Maret. Surakarta

Sari, Diana, 2012. "Pengaruh Pengendalian Internal Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah". Dalam *Prosiding ISSN- 2252-3936*.

Simarmata, Charli Andreas, 2015. Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibiltas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada SKPD Pemerintahan Daerah Kabupaten Simalungun). *Skripsi.* UR

Sumarsono, Hadi, 2009. Analisis Kemandirian Otonomi Daerah. *Jurnal Akuntans*i Pemerintah Vol.1. No 1. 2009.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

_____Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

_____Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

_____Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern.